

Masa Depan Partai Politik

Oleh **Luerdi**

PARTAI politik memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik (Parpol) merupakan syarat terbentuknya negara demokratis. Tidak ada sistem politik yang berjalan tanpa adanya partai politik, kecuali pada sistem politik negara-negara otoriter atau kekuasaan tradisional di mana raja atau penguasa dalam menjalankan kekuasaannya sangat bergantung pada kekuatan militer.

Giovanni Sartori memberikan definisi Parpol sebagai kelompok politik apa saja yang ikut serta dalam Pemilu dan mampu menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan publik. Dengan demikian tujuan didirikannya partai politik adalah untuk meraih jabatan politik, mendapatkan kekuasaan politik, dan mengontrol proses perumusan kebijakan. Parpol menjadi intermediasi penghubung kepentingan rakyat dan pembuat kebijakan dalam pemerintahan demokrasi.

Model demokrasi yang sedang berkembang di dunia kini merupakan format demokrasi perwakilan, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini partai politik berperan dalam mengupayakan perwakilannya di parlemen melalui Pemilu, atau juga terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Namun, di Indonesia berbagai kritik dilontarkan kepada partai politik. Apalagi setelah melewati Pemilu Legislatif pada April yang lalu.

Buruknya kinerja partai politik dapat dilihat paralel dengan buruknya kinerja perwakilan partai politik di parlemen dan eksekutif. Ini kontraproduktif dengan peran partai politik sebagai agregasi kepentingan, yaitu intermediasi antara kepentingan rakyat dan kebijakan. Realitasnya, banyak kebijakan yang dibuat oleh parlemen dan eksekutif kerap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Belum lagi berbagai kasus korupsi hingga

prilaku asusila yang melibatkan kader partai politik.

Perpecahan internal partai politik menjadi hal yang biasa kita saksikan diberbagai media. Bahkan perpecahan ini membawa aksi anarkis yang melibatkan pendukung kubu elit partai politik tersebut. Ini wujud gagalnya pendidikan politik di kalangan elit partai politik. Kekuasaan nampaknya lebih dikedepankan ketimbang solidaritas memperjuangkan kepentingan konstituen.

Pada masa kampanye Pemilu Legislatif lalu, kita disuguhkan dengan berbagai model kampanye partai politik. Akan tetapi kebanyakan kampanye yang dilakukan tidak mendidik masyarakat, hanya sekedar mengendalikannya banyaknya massa yang berkumpul pada suatu titik tertentu dan disuguhkan dengan berbagai hiburan. Substansi kampanye tidak dianggap penting oleh para penyelenggara kampanye.

Rekrutmen yang dilakukan partai politik untuk mengisi posisi Caleg juga bermasalah. Banyak partai politik tidak memiliki mekanisme rekrutmen yang jelas.

Terdapat juga partai politik yang memasang Caleg dengan pertimbangan popularitas saja. Ini tentunya akan menjadi masalah baru dalam kehidupan politik parlemen kita. Setelah Pemilu Legislatif pun kita masih dapat melihat bagaimana geliat partai politik dalam menyikapi perolehan dukungan suara. Ketidakpuasan muncul di mana-mana. Memang kekuasaan nampaknya menjadi impian elit partai politik sehingga dengan sadar ataupun tidak sadar melakukan berbagai cara mengekspresikan kekesalan dan kekalahan.

Masa Depan Partai Politik
Liberalisasi politik yang memunculkan ban-

yak partai politik nampaknya tidak memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa di negeri ini. Tetapi sebaliknya semakin menambah runyamnya kehidupan dan sistem politik di negeri ini. Itu dapat dilihat belum terwujudnya fungsi dan peran partai politik idealnya di negara demokratis. Bahkan negara dibebankan dana yang begitu besar untuk setiap perhelatan pesta demokrasi (Pemilu).

Multipartai sederhana bisa menjadi solusi dalam memperkuat dan memapankan sistem politik seperti halnya di negara-negara maju. Dengan demikian akan memperkecil potensi konflik dan tentunya dengan biaya politik yang lebih murah. Kualitas demokrasi akan lebih terukur dengan model sistem multipartai sederhana. Indikasi awal keinginan untuk mewujudkan model sistem kepartaian ini adalah dengan ditetapkannya *parliamentary threshold*, di mana partai politik yang tidak mampu memperoleh dukungan suara 2,5 persen secara nasional tidak layak mendapatkan perwakilan di parlemen pusat.

Setidaknya ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh partai politik di negeri ini agar dapat bertahan dan diterima oleh masyarakat. *Pertama*, meningkatkan kinerja partai politik yang dibuktikan dengan kinerja kadernya di parlemen dan eksekutif. Bila peningkatan kinerja partai politik dapat dilakukan, maka masyarakat akan meningkatkan kepercayaan kembali pada partai politik tersebut. Realitas pada Pemilu Legislatif 2009, sekitar 40 persen rakyat Indonesia memilih sikap Golput. Memang diakui banyaknya sikap Golput karena masalah administrasi, akan tetapi sebagian juga merupakan bentuk *silent protest* (protes terselubung) terhadap buruknya kinerja partai politik.

Kedua, memperbaiki sistem kaderisasi.

Kaderisasi partai politik diharapkan dapat memunculkan para pemimpin bermoral dan berintegritas. Karena itu partai politik seharusnya memperbaiki sistem kaderisasi yang dimiliki, termasuk dalam hal rekrutmen penempatan Caleg. Caleg yang dicalonkan oleh partai politik merupakan person yang berkualitas dan memiliki loyalitas terhadap kepentingan rakyat.

Ketiga, melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik tidak hanya dilakukan partai politik untuk kadernya, akan tetapi juga untuk masyarakat. Pendidikan politik diperlukan untuk melakukan pencerdasan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi melek politik, dan ini tentunya akan membantu mewujudkan demokrasi yang berkualitas dengan pemilih yang berkualitas pula.

Ketiga hal di atas setidaknya menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan partai politik di negeri ini. Seharusnya ini menjadi evaluasi bagi setiap partai politik dengan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap partai politik dan peran partai politik yang sudah mulai berkurang di tengah-tengah masyarakat. Padahal partai politik sebenarnya dapat berperan dalam mempercepat agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Anthony Mughan dan Richard Gunther, bahwa merosotnya peran partai politik selain buruknya perlakuan masyarakat terhadap partai politik dan berkembangnya sinisme terhadap politik partisan, persoalan ini juga banyak diakibatkan oleh perilaku politikus itu sendiri sebagaimana yang kerap dipublikasikan di media massa. Dengan memperhatikan berbagai persoalan yang dimiliki partai politik di atas, hanya partai politik yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyatlah yang akan bertahan di masa yang akan datang.***

Luerdi, Ketua Kebijakan Publik
KAMMI Daerah Riau.